

MANAJEMEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU

Rahma Yulita¹, Rudin. M², Muhammad Dharma Halwi³

Pasca Sarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih sebanyak empat orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan; (1) Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Palu Timur Kota Palu pada dasarnya telah diterapkan dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. (2) Faktor penghambat meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya budaya pengendalian internal, keterbatasan sistem dan infrastruktur pendukung, lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan, serta kompleksitas regulasi dan beban administratif turut mengurangi efektivitas penerapan SPIP. (3) Faktor pendukung meliputi adanya komitmen pimpinan kecamatan, ketersediaan kerangka regulasi dan pedoman teknis SPIP, struktur organisasi dan pembagian tugas yang relatif jelas, serta praktik administrasi dan dokumentasi yang tertib. Selain itu, dukungan pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat Daerah serta terbangunnya hubungan kerja dan komunikasi internal yang harmonis turut memperkuat penerapan SPIP

Kata kunci: Manajemen, Sistem dan Pengendalian Internal Pemerintah.

ABSTRACT

The objectives of this study were: (1) To determine and analyze the management of the government's internal control system in East Palu District, Palu City. (2) To determine and analyze the factors inhibiting the management of the government's internal control system in East Palu District, Palu City. (3) To determine and analyze the factors supporting the management of the government's internal control system in East Palu District, Palu City. This research was qualitative, with four selected informants. Data collection used observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used were: (1) Data collection (2) Data reduction (3) Data presentation (4) Verification (5) Conclusions. Based on the research results and analysis conducted by the researcher, the following conclusions were drawn: (1) The Government Internal Control System (SPIP) in East Palu District, Palu City, has essentially been implemented and integrated into the administration of sub-district government. (2) Inhibiting factors include limited human resource quality and quantity, a weak internal control culture, limited supporting systems and infrastructure, poor follow-up on monitoring results, and regulatory complexity and administrative burdens, all of which contribute to the effectiveness of SPIP implementation. (3) Supporting factors include the commitment of sub-district leaders, the availability of a regulatory framework and technical guidelines for SPIP, a relatively clear organizational structure and division of tasks, and orderly administration and documentation practices. Furthermore, supervisory support and guidance from the Regional Inspectorate, along with the development of harmonious working relationships and internal communication, have strengthened SPIP implementation.

Keywords: Management, Systems and Government Internal Control.

A. PENDAHULUAN

Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Palu Timur Kota Palu, penerapan SPIP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan

layanan publik. SPIP mencakup unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang saling terkait untuk mencegah penyimpangan, mengelola risiko, dan memastikan akuntabilitas kegiatan pemerintahan.¹

Manajemen sistem pengendalian pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan investasi penting untuk mencapai pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Penerapan sistem ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih berkualitas, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pengendalian internal diperlukan dalam suatu instansi pemerintahan karena adanya keterbatasan pimpinan dalam melakukan pengawasan aktivitas kantor sehari-hari. Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menyakinkan manajemen bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai. Kegunaan dari pengendalian internal itu sendiri dengan tujuan adanya aktivitas yang efisien dan efektif dalam hubungannya dengan misi dasar dan kegiatan organisasi, termasuk standar kinerja dan pengamanan sumber daya, atau pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari pengulangan sumber daya yang tidak efisien.² Pengendalian internal yang tidak baik akan mengakibatkan kerugian bagi negara, terlebih jika terjadi penyelewengan. Dengan adanya masalah tersebut, sangat diperlukan sebuah pengelolaan untuk mengurangi resiko yang terjadi dan mencegah penyimpangan pada instansi. Pencegahan dapat dilakukan dengan adanya pelimpahan

¹ Marisca, C., & Mulyono, A. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gadingrejo. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(1).

² Murti, A., & Rizkika, S. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5736-5747

wewenang dan tugas yang tepat, diiringi dengan pengendalian intern yang kuat bertujuan untuk melindungi aset negara. Sistem pengendalian membantu memastikan bahwa sumber daya publik, seperti anggaran dan personel, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pemerintahan di tingkat kecamatan.³

Pemerintah kecamatan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah kecamatan harus mempunyai sistem pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam sistem manajemen adalah sistem pengendalian manajemen. Karakteristik sistem pengendalian manajemen sektor publik yang umumnya lebih kompleks dan hierarkis. Ketidakpastian sektor publik sering kali menghadapi ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan anggaran, peraturan serta perubahan kebijakan pemerintahan. Pengendalian memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.⁴

Sistem ini menyediakan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pelayanan publik. Dengan pengendalian yang baik, diharapkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan menjadi lebih

³ Lubis, S. N., & Revida, E. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Upt Wilayah Iv Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 14-18.

⁴ Setiawaty, A. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(2).

optimal dan memuaskan masyarakat. Sistem ini menyediakan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.⁵

Berdasarkan penelitian awal di Kantor Kecamatan Mntikulore Kota Palu menunjukkan bahwa permasalahan dalam sistem pengendalian pemerintah mencakup berbagai aspek. Beberapa masalah utama yang sering dijumpai adalah: kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), serta kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif. Selain itu, juga terdapat masalah dalam hal implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁶

Permasalahan keuangan seperti ; (a) Keterbatasan Anggaran yaitu Penerapan SPIP membutuhkan anggaran yang cukup, termasuk untuk pelatihan, peralatan, dan infrastruktur. Keterbatasan anggaran dapat menghambat implementasi SPIP secara efektif. (b) Fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang Kompeten seperti SDM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penerapan SPIP. Keterbatasan kuantitas SDM, sehingga sulit untuk melayani semua tugas dan tanggung jawab. (c) Kurangnya

⁵ Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59

⁶ M Rudin, MLF Bakarbesy, 20245 Effectiveness of Additional Employee Income .Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, - *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 2025

pemahaman tentang SPIP yaitu Pegawai pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan, belum memahami dengan baik tentang SPIP dan bagaimana penerapannya. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan penerapan SPIP yang tidak optimal dan tidak efisien.

(d) Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi yaitu :Pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP belum dilakukan secara rutin dan terstruktur.⁷ Kurangnya pemantauan dan evaluasi dapat menyebabkan SPIP tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Manajemen Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. ?
- 2) Apa faktor penghambat Manajemen Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal,

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹ Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat permasalahan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kecamatan Palu Timur yang menarik untuk dilakukan penelitian.

⁸ Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

⁹ Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta

D. PEMBAHASAN

Sejarah Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Kecamatan Palu Timur merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Palu Timur terletak di bagian timur wilayah Kota Palu dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Palu Selatan serta Kecamatan Mantikulore. Keberadaan kecamatan ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang terbentuknya Kota Palu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan masyarakat Kaili.

Sebelum terbentuknya struktur pemerintahan modern, wilayah Palu Timur merupakan bagian dari kawasan permukiman masyarakat adat Kaili yang telah mendiami Lembah Palu sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat Kaili hidup dengan sistem sosial tradisional yang kuat, bergantung pada pertanian, perikanan, dan perdagangan sederhana.¹⁰ Wilayah yang kini menjadi Palu Timur dikenal sebagai daerah yang subur dan strategis karena dekat dengan pusat aktivitas masyarakat di Teluk Palu.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Palu mulai mengalami perubahan sistem administrasi. Pemerintah kolonial memperkenalkan pembagian wilayah untuk memudahkan pengendalian dan eksploitasi sumber daya. Meski demikian, struktur adat masih tetap berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Palu mengalami penataan ulang

¹⁰ Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59.

dalam sistem pemerintahan nasional, seiring dengan pembentukan daerah-daerah administratif baru.

Kota Palu secara resmi berkembang sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi Tengah setelah provinsi ini dibentuk. Seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pemerintahan serta ekonomi, diperlukan pembagian wilayah kota menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan Palu Timur kemudian dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pembangunan wilayah timur Kota Palu.

Dalam perkembangannya, Kecamatan Palu Timur tumbuh sebagai kawasan permukiman yang cukup padat. Wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai lapisan masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi dan luar Sulawesi. Keberagaman etnis dan budaya menjadikan Palu Timur sebagai wilayah yang dinamis dan plural, namun tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

Dari sisi ekonomi, Palu Timur berkembang sebagai kawasan pendukung aktivitas pusat kota. Banyak masyarakatnya yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Pasar tradisional, pertokoan, serta usaha kecil dan menengah tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan penduduk.¹¹ Selain itu, keberadaan

¹¹ Nduru, M., Nainggolan, A., & Situmorang, D. R. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(3), 15-34.

fasilitas pendidikan dan kesehatan turut mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat kecamatan ini.

Perkembangan infrastruktur di Kecamatan Palu Timur juga mengalami kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pembangunan jalan, jaringan listrik, air bersih, serta sarana komunikasi menjadi bagian dari program pembangunan Kota Palu. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Peristiwa bencana alam yang melanda Kota Palu juga menjadi bagian penting dalam sejarah Palu Timur. Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Palu memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Kecamatan Palu Timur. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam upaya penataan ruang, pembangunan kembali permukiman, serta penguatan kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana.

Pasca bencana, Kecamatan Palu Timur mengalami proses pemulihan dan pembangunan kembali yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial menjadi kekuatan utama dalam membangun kembali kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi warga.

Hingga saat ini, Kecamatan Palu Timur terus berkembang sebagai bagian integral dari Kota Palu. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dinamika sosial yang semakin kompleks, kecamatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan kota. Sejarah panjang Palu Timur mencerminkan perjalanan masyarakatnya dalam menghadapi perubahan zaman,

dari kehidupan tradisional hingga era modern, dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai lokal sebagai fondasi pembangunan.

1. Pembahasan Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penerapan SPIP di Kecamatan Palu Timur Kota Palu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta sasaran yang telah ditetapkan.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan yang terdiri dari unsur pimpinan hingga staf, diperoleh gambaran bahwa penerapan Manajemen SPIP telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

1. Perencanaan

Dalam aspek perencanaan, Kecamatan Palu Timur telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip SPIP. Perencanaan kegiatan disusun berdasarkan dokumen perencanaan resmi seperti Renstra, Renja, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mengacu pada visi dan misi Kota Palu. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Perencanaan yang terstruktur ini membantu meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas.

¹² Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 377-392

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses perencanaan masih bersifat top-down, sehingga partisipasi pegawai pada level bawah belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan pegawai dalam perencanaan sangat penting dalam konteks SPIP, karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta pemahaman terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan partisipatif agar pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif.¹³

2. Pengorganisasian

Pada aspek pengorganisasian, Kecamatan Palu Timur telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang formal. Setiap pegawai mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Kondisi ini sejalan dengan prinsip SPIP yang menekankan pentingnya kejelasan struktur dan wewenang dalam organisasi. Dengan pengorganisasian yang baik, risiko tumpang tindih tugas maupun penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Meskipun demikian, efektivitas pengorganisasian masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Beban kerja yang cukup tinggi pada beberapa seksi berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta penataan kembali beban kerja agar pengorganisasian dapat mendukung penerapan SPIP secara optimal.

¹³ Langi, B., Saerang, D. P., & Gerungai, N. Y. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada Pt. Gemilang Emas Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).

3. Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan, penerapan Manajemen SPIP di Kecamatan Palu Timur terlihat dari kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta didukung oleh pencatatan administrasi dan pelaporan yang relatif tertib. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap konsep SPIP masih terbatas pada aspek administratif. SPIP belum sepenuhnya dipahami sebagai sistem manajemen risiko yang menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan penerapan SPIP lebih bersifat formalitas, belum menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas pegawai. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan agar SPIP dapat diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. Pengawasan

Aspek pengawasan merupakan komponen penting dalam Manajemen SPIP. Di Kecamatan Palu Timur, pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh pimpinan serta pengawasan eksternal dari Inspektorat Daerah. Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil pengawasan juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.

¹⁴ Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200-204

Meskipun pengawasan telah dilaksanakan, masih terdapat kendala dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa temuan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga potensi risiko dapat berulang. Dalam konteks SPIP, pengawasan seharusnya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme tindak lanjut serta dokumentasi hasil pengawasan agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi secara optimal.¹⁵

Secara keseluruhan, penerapan Manajemen SPIP di Kecamatan Palu Timur Kota Palu telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan. Perencanaan yang terarah, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang tertib, serta pengawasan yang berjenjang menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Namun, efektivitas SPIP masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, budaya organisasi, dan komitmen pimpinan.

Oleh karena itu, penguatan Manajemen SPIP perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi yang berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam menjadikan SPIP sebagai bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan. Dengan demikian, Kecamatan Palu Timur diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

¹⁵ Ayuni dan Sofyan (Artikel 2023), Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau <https://repository.uin-suska.ac.id> >, diakses 2 Mei 2025.

2. Pembahasan faktor penghambat Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dirancang sebagai suatu proses integral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi SPIP di tingkat kecamatan, termasuk di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, kultural, dan teknokratis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penerapan SPIP secara keseluruhan.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat utama dalam penerapan Manajemen SPIP di Kecamatan Palu Timur adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur. Dari sisi kualitas, pemahaman pegawai terhadap konsep SPIP masih bersifat normatif dan administratif. SPIP dipersepsikan sebatas kewajiban dokumentasi dan kepatuhan prosedural, bukan sebagai instrumen manajemen risiko dan pengendalian kinerja organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif SPIP dan kapasitas kognitif aparatur dalam menginternalisasikannya.¹⁶

Dari sisi kuantitas, keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan terjadinya akumulasi beban kerja pada individu tertentu. Beban kerja yang tinggi berimplikasi pada menurunnya kualitas

¹⁶ Faisal, Sanapiah, 2013 Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta

pengendalian internal, karena pegawai cenderung memprioritaskan penyelesaian tugas administratif dibandingkan pengelolaan risiko dan pengawasan internal. Dalam perspektif teori manajemen publik, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara tuntutan organisasi dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

2. Lemahnya Budaya Pengendalian (Control Environment)

Faktor penghambat berikutnya adalah lemahnya budaya pengendalian sebagai elemen fundamental SPIP. Lingkungan pengendalian di Kecamatan Palu Timur belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan kesadaran risiko yang kuat. Pengendalian internal masih dipahami sebagai tanggung jawab pimpinan semata, bukan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh aparatur. Fenomena ini mengindikasikan bahwa SPIP belum terinternalisasi sebagai budaya organisasi (organizational culture).¹⁷ Padahal, dalam kerangka SPIP, lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas unsur-unsur lainnya. Lemahnya budaya pengendalian menyebabkan implementasi SPIP bersifat reaktif dan formalistik, cenderung dijalankan hanya ketika terdapat pemeriksaan atau pengawasan eksternal.

3. Keterbatasan Komitmen dan Kepemimpinan Transformasional

Komitmen pimpinan memiliki peran strategis dalam keberhasilan Manajemen SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pimpinan kecamatan telah menunjukkan komitmen normatif terhadap penerapan SPIP, namun komitmen

¹⁷ Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 377-392

tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan perilaku organisasi. Pimpinan masih lebih berfokus pada pemenuhan target kinerja jangka pendek dibandingkan penguatan sistem pengendalian internal jangka panjang. Dalam konteks teori kepemimpinan publik, lemahnya kepemimpinan transformasional berdampak pada rendahnya motivasi aparatur untuk menjadikan SPIP sebagai bagian dari praktik kerja sehari-hari. Tanpa keteladanan dan dorongan yang konsisten dari pimpinan, SPIP sulit berkembang dari sekadar kepatuhan administratif menjadi sistem manajemen yang efektif.¹⁸

4. Keterbatasan Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sistem dan infrastruktur pendukung penerapan SPIP. Pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan masih dilakukan secara konvensional dan terfragmentasi. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi risiko, pemantauan kinerja, serta evaluasi pengendalian internal secara komprehensif. Keterbatasan teknologi informasi menyebabkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tidak selalu tersedia secara tepat waktu dan akurat. Dalam perspektif governance modern, lemahnya dukungan sistem informasi berdampak langsung pada menurunnya efektivitas pengendalian internal dan akuntabilitas publik.¹⁹

¹⁸ Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian, CV. Pustaka Setia, Jakarta

¹⁹ Manullang T, 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.

5. Lemahnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pengawasan merupakan instrumen kunci dalam Manajemen SPIP, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh tindak lanjut atas hasil pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut temuan pengawasan di Kecamatan Palu Timur belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti secara optimal, sehingga permasalahan yang sama berpotensi terulang. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme pembelajaran organisasi (organizational learning). Pengawasan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana perbaikan berkelanjutan, melainkan lebih dipandang sebagai kegiatan evaluatif yang bersifat sesaat.

6. Kompleksitas Regulasi dan Beban Administratif

Faktor penghambat lainnya adalah kompleksitas regulasi dan tingginya beban administratif yang harus dipenuhi oleh aparatur kecamatan. Beragam regulasi yang saling tumpang tindih menyebabkan aparatur lebih fokus pada pemenuhan administrasi dibandingkan substansi pengendalian internal. Dalam kondisi demikian, SPIP berisiko direduksi menjadi sekadar checklist kepatuhan, bukan sistem manajemen yang bernilai strategis.²⁰

Sintesis Pembahasan Secara konseptual, faktor-faktor penghambat Manajemen SPIP di Kecamatan Palu Timur Kota Palu bersifat multidimensional dan saling memperkuat satu sama lain. Keterbatasan SDM, lemahnya budaya pengendalian, kurangnya kepemimpinan transformasional, keterbatasan sistem pendukung, lemahnya tindak lanjut pengawasan, serta kompleksitas regulasi

²⁰ Mangkunegara, Anwar Prabu, 2016. Manajemen Sumber Daya Perusahaan Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

membentuk suatu lingkaran masalah struktural. Oleh karena itu, upaya penguatan SPIP tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan yang menempatkan SPIP sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah.

E. KESIMPULAN

1. Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Palu Timur Kota Palu pada dasarnya telah diterapkan dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Hal ini tercermin dari adanya perencanaan yang mengacu pada dokumen resmi, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang mengikuti prosedur yang berlaku, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya budaya pengendalian, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas penerapan SPIP. Dengan demikian, Manajemen SPIP di Kecamatan Palu Timur Kota Palu memerlukan penguatan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur, internalisasi budaya pengendalian, serta penguatan kepemimpinan dan tindak lanjut pengawasan, agar SPIP dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.
2. Faktor penghambat Manajemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Palu Timur Kota Palu bersifat

multidimensional dan saling terkait. Hambatan utama meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya budaya pengendalian internal, serta belum optimalnya komitmen pimpinan dalam mendorong internalisasi SPIP sebagai sistem manajemen risiko dan kinerja. Selain itu, keterbatasan sistem dan infrastruktur pendukung, lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan, serta kompleksitas regulasi dan beban administratif turut mengurangi efektivitas penerapan SPIP. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menyebabkan SPIP cenderung dijalankan secara formalistik dan administratif, belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut ;

1. Penguatan kapasitas aparatur dan internalisasi SPIP

Pemerintah Kecamatan Palu Timur perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis SPIP yang berkelanjutan, dengan penekanan pada manajemen risiko dan pengendalian kinerja, agar SPIP tidak hanya dijalankan secara administratif tetapi terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari.

2. Optimalisasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengendalian

Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melekat dan sistem tindak lanjut yang terstruktur atas temuan pengawasan, termasuk pendokumentasian dan pemantauan berkala, sehingga kelemahan pengendalian dapat segera diperbaiki dan tidak berulang.

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, Lakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian kinerja agar hambatan akibat keterbatasan SDM dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, T. 2020, Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Teori dan Praktek , Penerbit Andi.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Ayuni dan Sofyan (Artikel 2023), Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau <https://repository.uin-suska.ac.id> , diakses 2 Mei 2025.
- Dirgantara, Hasan, Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian, Jakarta:PT.Bartiya Perdana Press, 2018.
- Edi Sutrisno, 2019, Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Yang Kompetitif. Cetakan kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200-204.
- Faisal, Sanapiah, 2013 Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Farizi, S., Aisy, S., & Arifin, S. (2025). Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 197-204.
- George R. Terry, Asas-Asas Manajemen. Penerjemah: Winardi. Bandung: PT.Alumni. 1986

- Handoko, T. Hani, 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Langi, B., Saerang, D. P., & Gerungai, N. Y. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada Pt. Gemilang Emas Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 377-392.
- Lubis, S. N., & Revida, E. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Upt Wilayah Iv Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kecamatan Medan Barat. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 14-18.
- Mahsum, M, 2018, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Konsep dan Implementasi, Penerbit Rajawali Pers.
- Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Maharani, A. (2025). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Layanan Administrasi Di Smk Negeri 1 Pinrang.
- Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Manullang T, 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2016. Manajemen Sumber Daya Perusahaan Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian, CV. Pustaka Setia, Jakarta.

- Marisca, C., & Mulyono, A. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gadingrejo. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(1).
- Murti, A., & Rizkika, S. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5736-5747.
- Nawawi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Yang Kompetitif*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nduru, M., Nainggolan, A., & Situmorang, D. R. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(3), 15-34.
- P-Robins, S. 2002. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Arcan.
- M Rudin, MLF Bakarbesy, 20245 Effectiveness of Additional Employee Income. Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat, - *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 2025
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan* Edisi kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59.
- Setiawaty, A. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Governance, 5(2).

Simamora, 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: STIE, YKPN.

Siregar, Syofian, 2010. Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Penerbit.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .Bandung: Alfabeta

Siregar, Syofian, 2020. Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.